

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji adanya pengaruh kekayaan daerah, *intergovernmental revenue*, belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan *political monitoring* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu kabupaten/kota di Indonesia periode tahun 2019 memiliki beberapa hasil yang dapat ditarik kesimpulan. Pertama, kekayaan daerah dilakukan dengan pengukuran yaitu total PAD dibandingkan dengan total pendapatan yang ada di dalam laporan operasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah punya pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga besar atau kecilnya kekayaan daerah yang diprosikan dengan PAD maka akan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah.

Kedua, *intergovernmental revenue* di dalam penelitian ini dilakukan dengan pengukuran yaitu total dana perimbangan dibandingkan dengan total pendapatan yang ada di dalam laporan realisasi anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* punya pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga besar atau kecilnya *intergovernmental revenue* maka akan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ketiga, belanja modal pada penelitian ini dilakukan dengan pengukuran yaitu total belanja modal dengan memanfaatkan transformasi Logaritma Natural (Ln). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal punya pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga besar atau kecilnya belanja modal yang dialokasikan maka akan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Keempat, didapatkan hasil bahwa *political monitoring* melemahkan hubungan kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap kekayaan yang bersumber dari PAD belum terlaksana dengan optimal. Sehingga banyaknya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD akan menurunkan kekayaan

daerah yang bersumber dari PAD diikuti dengan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kelima, *political monitoring* tidak dapat memoderasi hubungan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan hal ini, menunjukkan bahwa *political monitoring* dalam *intergovernmental revenue* tidak akan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan yang terakhir diperoleh hasil bahwa *political monitoring* tidak dapat memoderasi hubungan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan hal ini, menunjukkan bahwa *political monitoring* dalam belanja modal tidak akan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.2 Saran

Penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat diberikan ke beberapa pihak untuk menambahh referensi selanjutnya, antara lain:

- a. Untuk pemerintah daerah kabupaten/kota diharapkan hasil riset ini dapat memberikan informasi guna melakukan pengkajian terkait banyaknya anggota DPRD yang melakukan pengawasan agar memiliki kualitas terbaik sehingga dapat mengoptimalkan kinerja keuangan yang dilaksanakan pemerintah daerah di Indonesia.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru khususnya terkait kinerja keuangan pemerintah daerah untuk penambahan variabel independen lain yang tidak tercantum dalam penelitian ini seperti ukuran pemerintah daerah, leverage dan opini BPK. Selain itu, dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah selain menggunakan rasio efisiensi yang digunakan pada penelitian ini juga dapat menggunakan rasio efektifitas, kemandirian dan ekonomi.